DINAMIKA IJTIHAD KOLEKTIF DAN PENGEMBANGAN SUMBER HUKUM ISLAM ERA KHULAFĀ' AL-RĀSYIDĪN

Ahmad Zulkifli Affandi¹, Lomba Sultan², Azman Arsyad³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

www.ahmadzulkifli@gmail.com¹, lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id²,

azman.azman@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

This study aims to explore the legislative function of the sahabah (companions of the Prophet), the authority of fatwa, the use of legal sources, and the long-term impact on the structure of Islamic law during the Khulafā' al-Rāsyidīn period. Employing a qualitative, normative-juridical approach through library research, the analysis is based on primary and secondary sources such as the Qur'an, Hadith, classical Islamic legal texts, and relevant scholarly articles. The findings reveal that the collective ijthad and fatwa practices of the sahabah were innovative responses to unprecedented legal challenges following the Prophet's death, ensuring the continuity and adaptability of Islamic law in a rapidly changing socio-political landscape. The research highlights the pivotal role of collective authority and consultation (shura) in the legislative process, which laid the groundwork for the emergence of Islamic legal schools (mazhab). This study's novelty lies in its comprehensive analysis of the collective dimension of fatwa authority and its long-term influence on Islamic legal structures, which has been underexplored in normative literature. The results suggest that the adaptive model of legislation and fatwa from this era can inform contemporary Islamic legal reforms, and further research is recommended to deepen understanding of shura mechanisms and fatwa authority as models for modern Islamic jurisprudence.

Keyword: Islamic legislation, fatwa authority, ijthad, Khulafā' al-Rāsyidīn, Islamic legal development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi fungsi legislasi para sahabat, otoritas fatwa, penggunaan sumber hukum, serta dampak jangka panjangnya terhadap struktur hukum Islam pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn. Dengan menggunakan metode kualitatif berpendekatan yuridis-normatif melalui studi pustaka, analisis dilakukan terhadap sumber primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab klasik, dan artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijthad kolektif dan fatwa para sahabat merupakan inovasi dalam merespons persoalan hukum baru pasca wafatnya Nabi, sehingga mampu menjaga kesinambungan dan relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial-politik yang pesat. Penelitian ini menyoroti pentingnya otoritas kolektif dan musyawarah (*syura*) dalam proses legislasi, yang menjadi fondasi lahirnya mazhab-mazhab hukum Islam. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komprehensif terhadap dimensi kolektif otoritas fatwa dan dampak jangka panjangnya terhadap struktur hukum Islam, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur normatif. Temuan ini merekomendasikan model legislasi dan fatwa adaptif masa sahabat sebagai inspirasi pembaruan hukum Islam kontemporer, serta mendorong penelitian lanjutan tentang mekanisme musyawarah dan otoritas fatwa untuk pengembangan sistem hukum Islam modern.

Kata Kunci: legislasi Islam, otoritas fatwa, ijthad, Khulafā' al-Rāsyidīn, Perkembangan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Masa Khulafā' al-Rāsyidīn (632–661 M) merupakan periode transisi yang sangat penting dalam sejarah legislasi Islam, karena menjadi masa pertama setelah wafatnya Rasulullah saw. di mana otoritas legislasi berpindah dari Nabi kepada kolektifitas sahabat

(Syarbaini, 2023). Pada masa ini, para sahabat menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesinambungan hukum Islam di tengah perubahan sosial, politik, dan geografis yang signifikan (Ni'am, 2016). Perluasan wilayah kekuasaan Islam menyebabkan munculnya berbagai persoalan baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunah, sehingga proses ijtihad dan penafsiran hukum menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan zaman (Zein, 2022).

Beberapa penelitian telah membahas peran legislasi pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, terutama terkait fungsi ijtihad dan penggunaan sumber hukum Islam. Penelitian-penelitian tersebut menyoroiti bagaimana para sahabat menerapkan hukum dalam konteks sosial-politik yang dinamis. Kajian-kajian tersebut masih kurang mendalami siapa saja yang memegang otoritas fatwa dan bagaimana sumber hukum dikembangkan secara kolektif di masa itu.

Selain itu, temuan-temuan sebelumnya menunjukkan adanya variasi dalam strategi legislasi yang diterapkan para sahabat, yang berimplikasi pada munculnya ragam mazhab dan pemikiran hukum Islam. Dampak jangka panjang dari aktivitas legislasi tersebut terhadap struktur hukum Islam belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks dinamika sosial-politik pasca-khilafah al-Rāsyidah.

Dari permasalahan yang ada, aspek otoritas fatwa dan pengembangan sumber hukum pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn masih merupakan area yang lemah dalam literatur hukum Islam normatif. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi legislasi para sahabat, otoritas fatwa, penggunaan sumber hukum, serta dampak jangka panjangnya terhadap struktur hukum Islam, guna mengisi kekosongan kajian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder berupa literatur hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, dan artikel terkait legislasi Islam pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn (Ridwan, Suhar, et al., 2021).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumentasi dengan membaca dan menganalisis sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis komprehensif, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan mengevaluasi fenomena legislasi Islam pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn secara sistematis dan mendalam.

Analisis data dilakukan secara deduktif, mulai dari konsep umum legislasi Islam dan ijtihad, kemudian difokuskan pada peran para sahabat dalam menetapkan hukum dan otoritas fatwa, serta dampak jangka panjangnya terhadap struktur hukum Islam (Ruslan, 2004). Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman normatif yang komprehensif terhadap proses legislasi pada masa tersebut.

LANDASAN TEORETIS

A. Legislasi Hukum Islam dan Sumber-sumbernya

Legislasi dalam konteks hukum Islam merujuk pada proses penetapan hukum oleh otoritas negara dalam bentuk undang-undang yang bersifat mengikat dan wajib ditaati masyarakat. Istilah ini berasal dari kata *legislate* (Inggris) dan *taqin* (Arab), yang secara terminologis berarti penyusunan hukum secara sistematis dan resmi oleh pemerintah berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, yakni al-Qur'an, sunah, dan ijtihad ulama. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *taqin* adalah kodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang yang sah dan diberlakukan secara nasional. Meskipun istilah *al-Hukm al-Islāmī* tidak disebut dalam al-Qur'an dan sunah, istilah *al-Syari'ah* dan *al-Fiqh* digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum Islam (Wardi, 2018). Dengan demikian, legislasi hukum Islam adalah upaya negara menjadikan ajaran Islam sebagai hukum positif yang sah dan memiliki kekuatan memaksa.

Pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, proses legislasi hukum Islam menempati posisi sentral dalam menjaga kesinambungan dan relevansi ajaran Islam di tengah perubahan sosial, politik, dan geografis yang pesat. Legislasi hukum Islam pada periode ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang belum pernah dihadapi pada masa Nabi Muhammad saw. maupun belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Ramadan et al., 2025).

1. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Semua ketentuan hukum yang berlaku bagi umat Islam harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, para khalifah sangat berhati-hati dalam merujuk ayat-ayat Al-Qur'an untuk memutuskan perkara hukum, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun urusan sosial-politik (Ridwan, Umar, et al., 2021). Al-Qur'an dipandang sebagai wahyu Allah yang bersifat mutlak dan abadi, sehingga menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

2. Sunnah Nabi sebagai Sumber Kedua

Sunnah atau hadis Nabi Muhammad saw. menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sunah berfungsi sebagai penjelas, penambah, dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum atau belum rinci. Para Khulafā' al-Rāsyidīn sangat selektif dalam menggunakan hadis, mengingat kekhawatiran akan terjadinya distorsi atau pemalsuan hadis sepeninggal Nabi (Jaya, 2019). Oleh karena itu, periwayatan hadis pada masa ini sangat dibatasi dan hanya diterima dari sahabat yang benar-benar dipercaya integritasnya.

3. Ijtihad Sahabat sebagai Sumber Ketiga

Jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya secara jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka para sahabat melakukan ijtihad, yaitu upaya intelektual untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan akal sehat, maslahat, dan prinsip

keadilan. Ijtihad menjadi sumber hukum ketiga yang sangat penting pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru akibat perluasan wilayah Islam dan kompleksitas masyarakat yang semakin beragam (Susilo et al., 2023).

Prinsip ijtihad ini ditegaskan dalam hadis dialog Nabi dengan Mu'adz bin Jabal:

“Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal: Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum? Mu'adz menjawab: saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Qur'an). Rasulullah bersabda: jika kamu tidak menjumpainya dalam al-Qur'an? Mu'adz menjawab: maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah bersabda: jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul? Muadz menjawab: saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran saya.” (HR. Abu Dawud).

Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Keputusan yang dihasilkan dari ijtihad pun harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan kemaslahatan umat. Para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dikenal sangat mengedepankan prinsip ijtihad dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan nashnya secara eksplisit, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat saat itu (Akmansyah, 2015). Keputusan hukum pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn tidak hanya didasarkan pada otoritas individu, tetapi juga melalui musyawarah bersama para sahabat utama (Imran, 2015). Musyawarah menjadi mekanisme penting untuk memastikan keputusan hukum bersifat kolektif, adil, dan sesuai dengan semangat syariat Islam.

Perkembangan hukum Islam pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn sangat pesat karena adanya kebutuhan untuk merespons persoalan baru yang muncul akibat ekspansi wilayah dan perubahan masyarakat. Hal ini mendorong munculnya pemikiran hukum yang dinamis dan adaptif, serta menjadi cikal bakal lahirnya berbagai mazhab dan aliran pemikiran hukum Islam di periode-periode berikutnya.

B. Ijtihad dan Fatwa

Ijtihad berasal dari kata Arab *jahada* yang berarti “bersungguh-sungguh” atau “mengerahkan segala kemampuan”. Secara terminologi, ijtihad adalah usaha maksimal seorang ahli hukum Islam (mujtahid) dalam menggali dan menetapkan hukum syariat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, terutama ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan eksplisitnya dalam Al-Qur'an dan hadis (Fauzi et al., 2022). Ijtihad merupakan proses penalaran hukum (istinbath) yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan intelektual dan keilmuan mendalam untuk menemukan solusi hukum yang sesuai prinsip syariat (Hidayat & Septina, 2025). Karakteristik ijtihad antara lain sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi syarat keilmuan tinggi dalam ilmu Al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab, dan maqasid syariah.

2. Merupakan usaha sungguh-sungguh dan pengerahan segenap kemampuan intelektual.
3. Hasil ijtihad bersifat dugaan kuat (*zhan*), bukan kebenaran mutlak (*qat'i*).
4. Bertujuan menemukan hukum yang bersifat praktis dan relevan dengan konteks zaman.

Ijtihad memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan sunah, salah satunya QS. An-Nisa: 59 yang menganjurkan taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, serta hadis Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang menegaskan urutan penggunaan Al-Qur'an, sunah, dan ijtihad dalam menetapkan hukum (Wijayanti & Meftahudin, 2018). Ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan perubahan sosial, sehingga hukum Islam tidak kaku dan mampu menjawab persoalan baru secara kontekstual. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan kehilangan fleksibilitasnya dalam menghadapi tantangan zaman (Azahra et al., 2025).

Fatwa adalah pendapat atau penjelasan hukum Islam yang diberikan oleh seorang ulama atau mufti yang memiliki kompetensi keilmuan dalam agama Islam, sebagai jawaban atas pertanyaan hukum yang diajukan oleh individu atau masyarakat (Habibah & Irwansyah, 2021). Fatwa berfungsi sebagai tuntunan hukum yang bersifat kasuistik, artinya diberikan untuk kasus atau persoalan tertentu yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, atau ijma' (Cahyani, 2016).

Fatwa merupakan institusi normatif yang berperan penting dalam menetapkan hukum Islam secara fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Asmar et al., 2023). Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal (legal binding), fatwa mengikat secara moral bagi pihak yang meminta fatwa (*al-mustafti*) dan dapat menjadi rujukan dalam praktik sosial keagamaan. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut mufti, yang harus memiliki keilmuan dan integritas tinggi agar fatwa yang dikeluarkan mendapat legitimasi dan diterima masyarakat (Putra et al., 2022). Otoritas fatwa bersifat persuasif, bukan koersif; artinya fatwa tidak memaksa untuk diikuti, melainkan memberikan panduan berdasarkan pengetahuan agama yang mendalam (ama Amarodin, 2019). Keputusan menerima atau menolak fatwa sepenuhnya bergantung pada kehendak individu muslim, namun harus didasarkan pada alasan yang rasional dan bukan hawa nafsu (Syarbaini, 2023). Di antara fungsi dan peran fatwa dapat dibagi sebagai berikut:

1. Menjawab persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber utama syariat.
2. Menjadi instrumen fleksibel untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial.
3. Menjadi media komunikasi antara ulama dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah keagamaan.
4. Memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan umat melalui penafsiran hukum yang adaptif (Mujib, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Mula Pemikiran Hukum Islam pada Masa Khulafa' al-Rasyidin

Masa ini dimulai dengan wafatnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriyah dan berakhir pada penghujung abad pertama Hijriyah. Kami menyebutnya sebagai masa sahabat karena otoritas legislatif pada masa ini dipegang oleh para tokoh sahabat Rasulullah, sebagian dari mereka hidup hingga dekade ke-10 Hijriyah, seperti Anas bin Malik yang wafat pada tahun 93 H.

Masa ini dikenal sebagai masa tafsir tasyri'ī (penafsiran hukum) dan pembukaan pintu istinbāt (penggalan hukum) terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki nash eksplisit. Para tokoh sahabat mengeluarkan banyak pendapat dalam menafsirkan nash-nash hukum dalam Al-Qur'an dan Sunah yang menjadi rujukan legislasi dalam menjelaskan dan menafsirkannya. Mereka juga mengeluarkan banyak fatwa terkait peristiwa yang tidak memiliki nash, yang menjadi dasar bagi ijtihad dan istinbāt hukum (Khallaf, n.d.).

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang tergolong Khulafā' al-Rasyidīn, yaitu Abu Bakar al-Ṣiddiq, 'Umar bin Khattab, Usmān bin 'Affān, dan 'Ali bin Abi Ṭālib. Masa kepemimpinan mereka berlangsung selama tiga dekade, dari tahun 632 hingga 662 M, dan dianggap sebagai periode awal pembentukan hukum Islam atau fikih Islam (Ali, 2015). Dalam masa ini, wilayah Islam meluas melampaui Jazirah Arab, meliputi wilayah seperti Mesir, Syam, Persia, dan Irak (Nofrianti, 2018). Perluasan ini memunculkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pemerintahan, yang belum pernah dihadapi pada masa Nabi. Karena tidak semua permasalahan memiliki jawaban eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunah, para sahabat melakukan ijtihad sebagai upaya merumuskan hukum melalui penalaran yang bersumber pada prinsip-prinsip syariat (Ilyas, 2018).

Ijtihad yang dilakukan para sahabat bersifat hati-hati dan tidak fanatik. Mereka menghormati perbedaan pendapat serta tidak mengklaim kebenaran mutlak terhadap pandangan masing-masing (Fauzi, 2018). Contohnya adalah interaksi antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang saling menghargai ijtihad masing-masing dalam menetapkan hukum (Lubab & Pancaningrum, 2015). Pemikiran hukum (ijtihad) ini juga lahir dari musyawarah besar yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, sebagai bentuk perumusan hukum terkait kepemimpinan umat pasca-Nabi (Ridlo & Yunus, 2022). Sejak saat itu, proses ijtihad tidak hanya terbatas pada urusan ibadah dan muamalah, tetapi juga meluas pada bidang administrasi dan kenegaraan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya ijtihad pada masa ini antara lain: (1) munculnya persoalan baru yang belum memiliki regulasi hukum secara tekstual dalam Al-Qur'an dan sunah; (2) perlunya penafsiran terhadap nash yang sudah ada agar tetap relevan dengan perkembangan zaman; dan (3) adanya kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil pada konteks yang berbeda (Bedong, 2018). Oleh karena itu, masa Khulafā' al-Rasyidīn merupakan tonggak penting dalam sejarah pemikiran hukum Islam karena

menunjukkan dinamika, fleksibilitas, dan prinsip musyawarah yang menjadi dasar dalam merumuskan hukum Islam secara kontekstual.

B. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam pada Masa Khulafa' al-Rasyidin

1. Para Pemegang Otoritas Legislasi pada Masa Khulafa' al-Rasyidin

Pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*, otoritas legislasi berpindah dari Nabi Muhammad saw. kepada para sahabat yang memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman langsung bersama beliau ('Audah, n.d.). Kebutuhan hukum yang muncul setelah wafatnya Nabi tidak dapat dijawab seluruhnya oleh nash yang telah ada, karena keterbatasan akses masyarakat awam terhadap Al-Qur'an dan sunah, serta belum terdokumentasikannya seluruh sumber hukum tersebut secara menyeluruh (Khallaf, n.d.). Para sahabat karena kedekatan mereka dengan wahyu, hafalan, dan partisipasi dalam proses tasyri' saat Nabi hidup muncul sebagai rujukan utama dalam menjelaskan dan menetapkan hukum terhadap kasus-kasus baru melalui ijtihad. Mereka tidak diangkat secara formal oleh kekhalifahan, tetapi otoritasnya diakui karena integritas dan kompetensi ilmiah yang dimiliki (Aziz, 2024). Di antara sahabat yang menjadi mufti di berbagai wilayah Islam adalah *Khulafā' al-Rāsyidīn*, Zaid bin Šābit, Abdullah bin 'Abbas, Mu'az bin Jabal, dan lainnya, dengan jumlah keseluruhan melebihi seratus tiga puluh orang. Pada awalnya, aktivitas fatwa bersifat kolektif dan terpusat di Madinah, namun seiring meluasnya wilayah Islam, sistem legislasi menjadi lebih tersebar dan bersifat individual di berbagai kota utama umat Islam. (Khallaf, n.d.)

2. Dinamika pada sumber-sumber Hukum Islam Masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*

Pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*, terjadi dinamika penting yang memengaruhi tiga sumber utama hukum Islam: Al-Qur'an, sunah, dan ijtihad (Pakhrujain & Habibah, 2022). Perubahan besar pada sumber pertama, yaitu Al-Qur'an, adalah proses pembukuan (*tadwīn*) yang dimulai pada masa Abu Bakar al-Šiddīq sebagai respons terhadap banyaknya sahabat penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam Perang Riddah (Rizkia & Hardiyansyah, 2022). Mushaf pertama ini kemudian dijaga oleh Umar bin al-Khattāb dan Hafšah binti Umar, hingga akhirnya pada masa Usmān bin 'Affān disalin dan disebarluaskan secara resmi ke berbagai wilayah Islam (Maulidya & Fauzi, 2023). Dampak legislatif dari pembukuan ini sangat signifikan: ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an menjadi *mutawātir* secara tertulis dan lisan, bersifat *qaṭ'ī al-wurūd*, serta menjadi rujukan yang tidak diperselisihkan dalam hal teksnya (Khallaf, n.d.).

Sementara itu, sunah Nabi belum dibukukan secara resmi pada masa ini (Al-Zuhaili, 2006). Umar sempat mempertimbangkan hal tersebut namun mengurungkannya karena khawatir bercampur dengan al-Qur'an (Husna, 2019). Upaya individu seperti yang dilakukan oleh 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Āsh dengan catatan *al-Šādiqah* menjadi pengecualian (Al-Dinawari, 1999). Untuk menjaga validitas hadis, para sahabat menerapkan langkah-langkah ketat seperti keharusan

menghadirkan saksi, pembuktian periwayatan, dan sumpah. Namun, tidak adanya pembukuan resmi menyebabkan dua dampak besar: lahirnya disiplin ilmu kritik sanad dan perbedaan pendapat terkait kedudukan serta keabsahan Sunnah sebagai *hujjah syar'iyah*.

Adapun sumber ketiga, yakni ijtihad para sahabat, juga belum dibukukan. Para sahabat tidak menganggap fatwanya bersifat mengikat, dan perbedaan pendapat dalam banyak masalah fikih sering terjadi di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad bersifat personal, terbuka terhadap kritik, dan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kemaslahatan umat. Masa ini mencerminkan dinamika legislasi yang sangat aktif, terbuka, dan bertanggung jawab, serta menjadi fondasi penting bagi perkembangan hukum Islam pada masa-masa setelahnya (Khallaf, n.d.).

3. Strategi Penetapan Hukum pada Masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*

Strategi penetapan hukum pada masa *Khulafā' al-Rāsyidīn* didasarkan pada pendekatan hierarkis dan kontekstual terhadap sumber-sumber syariat. Para sahabat akan terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur'an dan sunah, dan jika tidak ditemukan nash yang jelas, mereka melakukan ijtihad berdasarkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum syariat, *qiyās*, serta pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ijtihad mereka luas dalam cakupannya karena tidak dibatasi oleh kerangka sistemik formal, melainkan oleh kelayakan intelektual dan kedekatan mereka dengan Nabi (Khallaf, n.d.).

Pada masa Abu Bakar dan 'Umar, proses legislasi dilakukan secara kolektif melalui musyawarah, di mana keputusan diambil bersama berdasarkan dalil atau ingatan atas sunah (Utsman, 1994). Ketika Islam berkembang ke berbagai wilayah, sahabat tersebar dan proses ijtihad pun mulai bersifat individual atau lokal.

Perbedaan fatwa di berbagai daerah muncul karena:

- a. Banyak teks hukum bersifat *zhannī al-dalālah*, yang memungkinkan perbedaan tafsir;
- b. Sunah belum dibukukan secara resmi dan hanya dihafal berdasarkan jalur periwayatan masing-masing;
- c. Kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di tiap wilayah memengaruhi cara pandang sahabat terhadap kemaslahatan.

Akibatnya, para sahabat seringkali berbeda dalam menetapkan hukum atas kasus yang sama, meskipun masing-masing memiliki argumen yang valid berdasarkan pemahaman dan konteks lokal yang dihadapi (Rahman, 2016). Prinsip hukum yang diikuti oleh para sahabat dalam penetapan hukum adalah strategi islami, yakni membatasi penetapan hukum hanya pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, tidak menetapkan hukum secara spekulatif sebelum suatu peristiwa terjadi, menyesuaikan hukum dengan kemaslahatan, serta memperhatikan asas kemudahan dan keringanan (*taysīr wa takhfiḥ*) (Taqusy, 2003).

4. Dampak Hukum masa Khulafā' al-Rāsyidīn

Dampak hukum yang ditinggalkan pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pembentukan sistem hukum Islam. Terdapat tiga dampak utama yang menjadi warisan legislatif masa ini dan terus berpengaruh hingga masa-masa berikutnya.

Pertama, penjelasan hukum terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Para sahabat yang merupakan mujtahid generasi pertama berperan penting dalam menyelidiki, menafsirkan, dan menerapkan nash hukum terhadap berbagai peristiwa yang mereka hadapi. Dalam proses ini, mereka menggunakan keahlian bahasa Arab, pemahaman terhadap sebab-sebab turunnya wahyu, serta wawasan terhadap prinsip-prinsip syariat. Hasil dari ijtihad mereka kemudian menjadi fondasi bagi penafsiran hukum Islam, yang banyak tercermin dalam literatur tafsir riwāyah seperti tafsir Ibnu 'Abbās dan al-Ṭabarī. Dengan demikian, sahabat tidak hanya menyampaikan nash, tetapi juga memberikan konteks hukum dan operasionalisasi syariat dalam kehidupan nyata (Khallaf, n.d.).

Kedua, yaitu fatwa-fatwa ijtihadiyah yang dikeluarkan oleh para sahabat. Ketika mereka menghadapi persoalan hukum yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mereka menggunakan ijtihad pribadi ataupun kolektif untuk merumuskan hukum. Pada masa awal kekhalifahan, khususnya pada masa Abu Bakar dan Umar, fatwa-fatwa lebih banyak bersifat kolektif dan dihasilkan melalui musyawarah bersama para sahabat senior. Namun, setelah Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir, fatwa mulai bersifat individual sesuai dengan konteks lokal masing-masing. Fatwa-fatwa ini kemudian menjadi referensi hukum bagi generasi tabi'in dan turut mewarnai perumusan fikih oleh imam-imam mazhab, baik sebagai landasan maupun sebagai objek kritik dan perbandingan (Khallaf, n.d.).

Ketiga, adalah pemisahan politik yang berdampak besar pada hukum Islam, terutama setelah terbunuhnya Usman bin 'Affān dan konflik bersenjata antara 'Ali dan Mu'āwiyah. Peristiwa ini melahirkan tiga arus utama dalam sejarah politik dan pemikiran Islam:

- a. Khawarij, yang menolak kekuasaan Utsman, Ali, dan Mu'āwiyah, serta menganggap bahwa kepemimpinan hanya sah jika ditentukan oleh pemilihan bebas berdasarkan kesalehan, dan boleh dilawan jika menyimpang dari nash;
- b. Syiah, yang meyakini bahwa Ali dan keturunannya merupakan pewaris sah kekhalifahan berdasarkan penunjukan langsung dari Nabi, serta menolak otoritas sahabat lain di luar ahl al-bait;
- c. Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah, kelompok mayoritas yang mengambil posisi moderat, mengakui keabsahan ijtihad politik para sahabat, dan menerima hadis sahih dari seluruh sahabat tanpa diskriminasi.

Pemisahan politik ini memiliki dampak besar dalam bidang perundang-undangan. Khawarij menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mereka anggap mendukung Utsman, Ali, atau Mu'awiyah dan lebih memilih hadis-hadis yang berasal dari mereka yang mereka setujui. Demikian pula Syiah, mereka menolak banyak hadis

yang diriwayatkan oleh sahabat selain keturunan Ali, dan mengutamakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlu al-bait. Sementara itu, ahlu sunnah mengakui semua hadis yang sahih dari para sahabat tanpa membedakan antara satu sahabat dengan yang lainnya. Dengan demikian, Ahlu Sunnah tidak sepakat dengan Khawarij dan Syiah dalam beberapa hal, seperti dalam masalah warisan, wasiat, dan beberapa fiqih pernikahan (Khallaf, n.d.).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses legislasi hukum Islam pada masa Khulafā' al-Rāsyidīn menunjukkan inovasi signifikan melalui penguatan otoritas fatwa dan ijtihad kolektif para sahabat dalam merespons persoalan hukum baru yang tidak ditemukan nash eksplisitnya dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Hal ini tidak hanya memastikan kesinambungan dan relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial-politik, tetapi juga menjadi fondasi bagi dinamika dan perkembangan mazhab-mazhab hukum Islam di periode berikutnya sebagai bentuk adaptasi hukum yang responsif dan kontekstual. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya peran kolektif sahabat dalam pengembangan sumber hukum dan otoritas fatwa, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur normatif, serta analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang aktivitas legislasi pada struktur hukum Islam. Untuk aplikasi praktis, hasil ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan model legislasi dan fatwa yang adaptif di era kontemporer, sementara untuk penelitian lanjutan disarankan mengkaji lebih jauh mekanisme musyawarah dan pola otoritas fatwa pada masa sahabat sebagai inspirasi pembaruan sistem hukum Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, A. Q. (n.d.). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-qanun al-wadh'i, Juz 1*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Akmansyah, M. (2015). Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 127–142.
- Al-Dinawari, A. M. A. bin M. bin Q. (1999). *Ta'wil mukhtalif al-Hadis*. Al-Maktabah Al-Islami.
- Al-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Wajiz fi ushul al-Fiqh al-Islami, Juz 1*. Dar al-Khair.
- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ama Amarodin, A. (2019). HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL FADL (KRITIK NALAR TERHADAP FATWA-FATWA HUKUM ISLAM). *PERSPEKTIF: Jurnal Program Studi Pendidikan Agama Islam*, 12(2), 46–80.
- Amsanul Amri, C. A. (2025, Januari). Hak Waris khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya. *Jurnal Tahqiq*, 19 (1), 28-34. doi:<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>
- Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). Fatwa Online dan Otoritas Islam

- Kajian Dampak Media Baru terhadap Aturan Agama. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 179–192.
- Azahra, A., Dzaki, F. M., Manik, R. H., Yudistira, J. P., Wismanto, W., & Mayasari, F. (2025). Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern. *Journal of Student Research*, 3(1), 61–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476>
- Aziz, M. A. (2024). *Ilmu Dakwah edisi revisi*. Prenada Media.
- Bedong, M. A. R. (2018). Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran). *Al-'Adl*, 11(2), 130–148.
- Cahyani, I. (2016). Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5, 301–313.
- Fauzi. (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Prenadamedia Group.
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Habibah, A. F., & irwansyah, irwansyah. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>
- Hidayat, F. T., & Septina, S. (2025). IJTIHAD DAN RUANG LINGKUPNYA. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(2), 382–388.
- Husna, N. (2019). Sejarah Hadis Dan Problematika Sahabat. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 267–280. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i2.966>
- Ilyas, H. H. (2018). *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Pustaka Alvabet.
- Imran, M. (2015). SISTEM SYURO' DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ISLAM. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216.
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri'*. Al-Madani Press.
- Lubab, N., & Pancaningrum, N. (2015). Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 394–413.
- Maulidya, A., & Fauzi, M. A. (2023). Sejarah Penulisan dan Pembukuan Al-Qur'an. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 3(1), 129–136. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i1.2762>
- Mujib, F. (2015). Perkembangan Fatwa di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 3(1), 94–121.
- Ni'am, S. (2016). TASAWUF DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL (Studi tentang Peran Tarekat dalam Dinamika Sosial-Politik di Indonesia). *Harmoni*, 15(2 SE-Articles), 123–137.

file://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/35

- Nofrianti, M. (2018). Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar Ibn Khattab (634-644 M). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 269–282.
- Pakhrujain, P., & Habibah, H. (2022). JEJAK SEJARAH PENULISAN AL-QUR'AN. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(3), 224–231. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/38>
- Putra, P. A., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Fatwa (al-ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 27–38.
- Rahman, M. T. (2016). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 63–70.
- Ramadan, N. H. A., Sultan, L., & Fatmawati. (2025). Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1 SE-Articles), 880–885. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1343>
- Ridlo, M., & Yunus, M. (2022). Dialektika Sunni Dan Syi'ah Dalam Pemikiran Politik Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 50–64.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Rizkia, T. P., & Hardiyansyah, M. R. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 88–94.
- Susilo, E., Aziz, Y., & Murtafi'ah, S. A. (2023). Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 11(01), 40–52.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48.
- Taqusy, M. S. (2003). *Tarikh al-Khulafa' al-Rasyidin al-Futuhat wa al-Injazat al-Asasiyah*. Dar al-Nafa'is.
- Utsman, M. R. (1994). *Al-Nazham al-Qadha'i fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Bayan.
- Wardi, M. C. (2018). LEGISLASI HUKUM ISLAM (Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik). *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 427–438.
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang produk halal, metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan hukum produk halal. *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, 20(2), 241–268.
- Zein, N. (2022). Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic Civilization (661-750 AD). *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 31–40.